TOTOBUANG		
Volume 9	Nomor 2, Desember 2021	Halaman 225—237

**KETERKENDALIAN PEMILIHAN BAHASA RUANG PUBLIK
PELABUHAN DAN BANDARA DI KOTA AMBON**
(Controlability of Language Application on Public Space Port and Airport in Ambon City)

Nita Handayani Hasan
Kantor Bahasa Provinsi Maluku
Kompleks LPMP Maluku, Jalan Tihu, Wailela, Rumah Tiga, Ambon 97234
Pos-el: bontanita00kantorbahasapromal@gmail.com

Diterima: 1 Februari 2021; Direvisi: 16 September 2021; Disetujui: 5 Oktober 2021
doi: <https://doi.org/10.26499/ttbng.v9i1.328>

Abstract

This study aims to review the phenomenon foreign terms using on sign boards at airports and ports in Ambon City. In order to describe this phenomenon, this study will use two ways. Frist, measuring the level of control language use with the results of language assessment; and second, describing the reason as the background of chosing the language in public spaces at ports and airports in Ambon City. It is a qualitative descriptive research. This research using photographs signboards and interviews result as the data. Photos analysis using a research instrument made by the Agency for Language Development. The results of photos analysis then supported by the results of interviews. This study found that ports and airports in Ambon City gets category B in control rating. This category shows that the use of Indonesian language in the port and airport areas in Ambon City is quite controlled. Based on the results of interviews, it is known that the effect of less socialization the existence of Law Number 24 of 2009 to ports and airports in Ambon City is signboards which wrote by foregn languages.

Keywords: public space, port, airport

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas fenomena penggunaan istilah asing pada papan-papan petunjuk yang berada di bandara dan pelabuhan di Kota Ambon. Agar dapat mendeskripsikan fenomena tersebut, penelitian ini mengukur tingkat keterkendalian penggunaan bahasa menggunakan hasil penilaian bahasa; serta mendeskripsikan latar belakang penyusunan dan penggunaan bahasa ruang publik di pelabuhan dan bandara di Kota Ambon. Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif. Data yang digunakan yaitu berupa foto-foto papan petunjuk dan hasil wawancara. Foto-foto yang diperoleh dianalisis menggunakan instrumen penelitian yang dibuat oleh Badan dan Pengembangan Bahasa. Hasil dari analisis foto-foto tersebut kemudian ditunjang dengan hasil wawancara. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan bahasa pada pelabuhan dan bandara di Kota Ambon masuk pada kategori peringkat terkendali B. Kategori ini menunjukkan penggunaan bahasa Indonesia di wilayah pelabuhan dan bandara di Kota Ambon cukup terkendali. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa minimnya sosialisasi mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 pada pihak bandara dan pelabuhan menjadi pemicu penggunaan istilah asing di ruang publik pelabuhan dan bandara di Kota Ambon. Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan masukan kepada pihak bandara dan pelabuhan di Kota Ambon untuk lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik.

Kata-kata kunci: bahasa ruang publik, pelabuhan, bandara

PENDAHULUAN

Negara-negara yang mementingkan penggunaan bahasa negara di ruang-ruang publik biasanya termasuk negara-negara yang merasa percaya diri pada kebudayaannya. Negara-negara tersebut sadar bahwa pengutamaan bahasa negara pada ruang publik memiliki peran utama dalam menjaga keutuhan bangsa, serta pelaksanaan politik diplomasi khususnya di bidang kebahasaan.

Pelabuhan dan bandara merupakan tempat-tempat strategis yang menunjukkan wajah penggunaan bahasa di suatu negara/wilayah. Kedua tempat tersebut sama-sama berperan sebagai pintu gerbang masuknya manusia dan barang. Papan-papan informasi yang ada di bandara dan pelabuhan harus bersifat informatif dan mudah dibaca bagi setiap penumpang. Penggunaan bahasa asing tanpa mencantumkan bahasa Indonesia pada papan-papan informasi di pelabuhan dan bandara domestik merupakan salah satu bentuk ketidakberpihakkan pengelola pelabuhan dan bandara bagi pengguna jasa yang mungkin saja tidak memahami penggunaan bahasa asing.

Sebagai provinsi kepulauan, keberadaan pelabuhan di Provinsi Maluku sangat memengaruhi roda kehidupan masyarakat. Pelabuhan bukan hanya berfungsi sebagai tempat keluar-masuk orang dan barang, tetapi juga menjadi pusat ekonomi dan sosial. Penggunaan bahasa Indonesia pada papan-papan petunjuk/informasi di pelabuhan-pelabuhan akan memudahkan pengguna pelabuhan dalam memperoleh informasi.

Selain pelabuhan, keberadaan bandara di Kota Ambon juga memiliki peran yang strategis. Kota Ambon sebagai ibu kota Provinsi Maluku merupakan pusat perekonomian di Provinsi Maluku. Hal tersebut menyebabkan sebagian besar pendatang yang menggunakan alat transportasi udara harus mampir di Kota Ambon untuk melakukan transit, kemudian

melanjutkan perjalanan di kabupaten-kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku. Oleh karena itu, penyediaan papan-papan informasi yang mudah dibaca sangat diperlukan bagi pengguna jasa.

Peneliti telah menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berhubungan pemakaian bahasa Indonesia di bandara-bandara di Indonesia. Penelitian pertama yaitu membahas mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam lanskap linguistik di bandara internasional Soekarno-Hatta (Widiyanto, 2018). Penelitian tersebut bertujuan menggambarkan pemakaian bahasa Indonesia dalam lanskap linguistik di bandara internasional Soekarno-Hatta, dengan fokus utama terminal 3. Data yang digunakan berupa hasil foto sebanyak 46 gambar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak bandara telah menerapkan penggunaan sistem tanda bilingual pada penamaan papan-papan informasinya, sedangkan pihak swasta lebih cenderung memakai tanda monolingual.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian yang mengambil lokasi penelitian di bandara internasional Yogyakarta (Jayanti, 2018). Penelitian tersebut bertujuan mengetahui penggunaan bahasa dalam lanskap linguistik di Bandara Internasional Yogyakarta. Data yang digunakan yaitu hasil tangkap layar dari video *youtube* berkata kunci *Yogyakarta International Airport*. Hasil penelitian tersebut yaitu pihak bandara lebih cenderung memilih menggunakan tanda multilingual/bilingual pada papan-papan informasinya dibandingkan pihak swasta. Pihak swasta lebih cenderung menggunakan tanda monolingual. Selain itu, terdapat kesalahan penulisan kata baku yang dilakukan oleh pihak bandara. Penelitian yang dilakukan Sahril, dkk mengambil objek pemantauan penggunaan bahasa di ruang publik bertempat di Kota Medan. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa penggunaan bahasa asing telah

mendominasi lanskap di Kota Medan. Selain itu, aspek onomastika, semiotika, dan spasial telah ditemukan pada lanskap linguistik di Kota Medan (Sahril, Harahap, & Hermanto, 2019).

Bagi para pengguna jasa transportasi bandara, stasiun, terminal, dan pelabuhan di sembilan kota di Indonesia, mayoritas setuju jika para penyedia jasa menggunakan bahasa Indonesia pada papan-papan petunjuknya. Hal tersebut berkaitan dengan kepraktisan dalam penyampaian informasi (Purba, 2019)

Pembahasan mengenai penggunaan bahasa di ruang publik merupakan hal yang sangat menarik untuk diteliti. Meskipun demikian, penelitian bahasa di ruang publik di Kota Ambon masih sangat sulit ditemukan. Penelitian yang berhubungan dengan ruang publik pernah penulis lakukan. Penelitian tersebut membahas tingkat keterkendalian penggunaan bahasa Indonesia pada media luar ruang di Kota Ambon. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Kota Ambon memiliki peringkat terkendali III. Hal tersebut menunjukkan bahwa bahasa Indonesia masih dipilih sebagai bahasa di media luar ruang di Kota Ambon (Hasan, 2019).

Berdasarkan informasi-informasi penelitian terdahulu tersebut, penelitian yang berhubungan dengan penggunaan bahasa di ruang publik pada pelabuhan dan bandara di Kota Ambon belum pernah dilakukan. Penelitian tersebut dianggap penting dilakukan karena pelabuhan dan bandara merupakan tempat yang paling strategis dan sering diakses oleh masyarakat.

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu bagaimana tingkat keterkendalian penggunaan bahasa di ruang publik di pelabuhan dan bandara di Kota Ambon jika dilihat dari hasil penilaian bahasa dan bagaimana latar belakang penyusunan dan penggunaan

bahasa ruang publik di pelabuhan dan bandara di Kota Ambon.

LANDASAN TEORI

Lanskap Bahasa

Lanskap bahasa merupakan kajian yang menggabungkan berbagai disiplin ilmu seperti linguistik terapan, sosiolinguistik, antropologi, sosiologi, psikologi, dan geografi kultural. Rumitnya pengaturan penggunaan bahasa di ruang publik harus dipecahkan dengan penggabungan disiplin-disiplin ilmu tersebut. Penggunaan teori lanskap bahasa diharapkan dapat mengungkapkan fenomena penggunaan bahasa di ruang publik.

Kajian lanskap bahasa menitikberatkan kajian pada keberadaan bahasa tulis yang merupakan bentuk tanda dalam sebuah lingkungan. Landry & Bourhis, 1997 menjelaskan bahwa bahasa ruang publik seperti tanda jalan, papan iklan, nama-nama jalan, nama tempat, papan nama pusat pertokoan komersil, dan tanda umum pada bangunan pemerintah merupakan kombinasi pada bentuk lanskap linguistik pada sebuah wilayah, lingkungan, atau kelompok masyarakat.

Pengertian lanskap bahasa kemudian mengalami perluasan oleh Shohamy dan Gorter. Menurut mereka, cakupan lanskap bahasa diperluas pada penggunaan bahasa dalam lingkungan, kata, dan citra yang dipajang di ruang publik dan menjadi pusat perhatian di suatu wilayah yang berkembang pesat (Shohamy & Gorter, 2008). Oleh karena itu, tanda yang dikaji dalam lanskap bahasa tidak hanya meliputi tanda rambu lalu lintas, nama jalan, papan iklan, tanda tempat komersial, nama tempat, dan tanda tempat yang bersifat sosial, tetapi juga meliputi ragam bahasa yang dipajang di ruang publik.

Lanskap bahasa memiliki dua fungsi, yaitu fungsi informasional dan

simbolis. Fungsi informasional yaitu makna penanda akan membedakan suatu wilayah dengan wilayah lainnya sesuai bahasa yang digunakan. Berdasarkan fungsi tersebut, bahasa berperan sebagai penanda wilayah dan pembeda antarsatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Fungsi simbolis menunjukkan keberadaan dan ketidakberadaan bahasa sebuah kelompok pada bahasa di ruang publik dapat berdampak pada perasaan kelompok tersebut. Dengan kata lain, fungsi simbolis berhubungan dengan keterwakilan identitas sebuah etnis.

Nama Sebagai Tanda di Ruang Publik

Tanda di ruang publik merupakan refleksi tatanan sebuah ruang. Sebuah ruang akan dinilai oleh penggunaanya karena ruang memiliki fitur sosiologis, kultural, sosiolinguistik, dan politis. Tanda-tanda yang berada dalam sebuah ruang akan memiliki peran sesuai penerima tanda tersebut. Tanda di ruang publik dapat memaksa audiensi agar mengikuti aturan mainnya, dengan sejumlah batasan dan pedoman norma yang dianut bersama (Blommaert, 2013). Sebuah tanda mengandung pesan dan memiliki hubungan dengan struktur sosial, hierarki dan kekuasaan (Stroud, C., 2009). Oleh karena itu, tanda-tanda yang berada di ruang publik dapat dimasukkan sebagai instrumen pengaturan dan pengendalian kekuasaan.

Ruang publik merupakan kawasan yang berbeda dengan ruang pribadi. Jika di ruang privat tidak ada akses apa pun bagi orang lain, maka di ruang publik, setiap orang memiliki hak untuk mengakses apa saja yang ada di sana. Oleh karena itu, sang pemilik ruang publik memiliki hak dan tanggung jawab penuh terhadap apa yang akan ditunjukkan kepada orang lain. Pemilik objek di ruang publik memiliki hak untuk mengatur objek yang akan digunakannya (Blommaert, 2013).

Ejaan Bahasa Indonesia

Ejaan bahasa Indonesia merupakan ejaan yang berlaku saat ini. Penggunaan ejaan bahasa Indonesia diatur dalam Permendikbud Nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Munculnya PUEBI didasari pada adanya dampak kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, dan seni terhadap penggunaan bahasa Indonesia, serta adanya kesadaran untuk memantapkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa Negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi (kata, kalimat, dan sebagainya) dalam tulisan (huruf-huruf) serta penggunaan tanda baca (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016). Ejaan juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan atau kaidah pelambangan bunyi bahasa, pemisahan, penggabungan, dan penulisannya dalam suatu bahasa. Ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarannya.

Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi, dalam bahasa tulis, oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk. Keteraturan bentuk akan berimplikasi pada ketepatan dan kejelasan makna. Ejaan ibarat rambu lalu lintas yang harus dipatuhi oleh setiap pengemudi. Jika pengemudi mematuhi rambu lalu lintas itu, terciptalah lalu lintas yang tertib, teratur, dan tidak semrawut.

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia mengatur tata cara pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan (Panitia Pengembang Pedoman Bahasa Indonesia, 2016)

1. Pemakaian huruf membicarakan bagian-bagian dasar dari suatu

- bahasa, yaitu abjad, vokal, konsonan, pemenggalan, nama diri, dan penulisan dan pemakaian huruf.
2. Penulisan kata membicarakan bidang morfologi dengan segala bentuk dan jenisnya, yaitu kata dasar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata ganti kau, ku, mu, dan nya, kata depan di, ke, dan dari, kata sandang si dan sang, partikel, singkatan dan akronim, angka dan lambing bilangan.
 3. Pemakaian tanda baca membicarakan teknik penerapan kelima belas tanda baca dalam penulisan dengan kaidahnya masing-masing.
 4. Penulisan unsur serapan membicarakan kaidah cara penulisan unsur serapan, terutama kosakata yang berasal dari bahasa asing.

Keterkendalian Pemilihan Bahasa

Penggunaan bahasa di ruang publik menunjukkan jati diri suatu bangsa. Ruang-ruang publik yang dihiasi dengan penggunaan bahasa negara yang tidak tepat dapat menunjukkan ketidakberpihakan masyarakat pada bahasa negaranya. Oleh karena itu, pengutamakan penggunaan bahasa negara di ruang publik harus terus-menerus digalakkan.

Masih banyak ditemukan penggunaan bahasa-bahasa asing dan kesalahan penggunaan kaidah kebahasaan pada tempat-tempat strategis. Kesalahan-kesalahan tersebut harus didata dengan baik agar pembinaan dapat dilaksanakan dengan lebih terarah (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018).

Permasalahan penggunaan bahasa di ruang publik berhubungan dengan

pemilihan bahasa, penerapan kaidah kebahasaan, dan tipografi kebahasaan. Permasalahan-permasalahan tersebut akan dinilai dengan skala nilai tertentu agar permasalahan pengendalian penggunaan bahasa dapat didata dengan baik.

Penilaian keterkendalian pemilihan bahasa dibagi menjadi penilaian kelompok fisik kebahasaan, kaidah kebahasaan, dan tipografi kebahasaan. Penilaian fisik kebahasaan dapat dilihat dari posisi, ukuran huruf, dan warna huruf. Penilaian fisik kebahasaan akan menunjukkan kecenderungan pemilihan bahasa di ruang publik.

Penilaian kaidah kebahasaan meliputi penggunaan ejaan, pilihan kata, dan penggunaan struktur kalimat. pemahaman yang mendalam mengenai ejaan bahasa Indonesia, akan sangat membantu dalam menilai unsur kaidah kebahasaan.

Pengetahuan mengenai keberadaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan akan sangat membantu dalam menilai tipologi bahasa dan fisik kebahasaan. Pada pasal 38 ayat (1) dijelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum. Pada ayat (2) menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/ bahasa asing. Berdasarkan pasal tersebut aturan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik harus selalu mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berfungsi memperluas dan memperdalam pemahaman tentang bagaimana hal-hal itu terjadi sedemikian rupa dalam kehidupan sosial. Penelitian kualitatif berusaha mencari penjelasan mengenai fenomena sosial. Hal tersebut berarti penelitian kualitatif bertujuan memahami dunia sosial manusia, serta untuk mengetahui latar belakang manusia berpikir dan bertindak. Penelitian kualitatif sangat bermanfaat karena mampu mengeksplorasi atau mengidentifikasi konsep atau pandangan hidup masyarakat; mengeksplorasi implementasi; memahami konteks kehidupan riil; dan membedah topik-topik sensitif yang membutuhkan fleksibilitas (LIPI, 2017: 5).

Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Peneliti menjelaskan kesalahan-kesalahan berbahasa pada ruang-ruang publik berdasarkan instrumen yang telah dibuat oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Penelitian ini bertempat di tiga pelabuhan dan satu bandara di Kota Ambon. Pelabuhan-pelabuhan yang dijadikan lokasi penelitian yaitu pelabuhan Yos Soedarso, Siwabessy, dan Slamet Riyadi. Ketiga pelabuhan tersebut dipilih karena ketiga pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan-pelabuhan yang paling sering diakses oleh masyarakat yang akan masuk maupun keluar dari Kota Ambon.

Pelabuhan Yos Soedarso merupakan pelabuhan utama, diperuntukan untuk kegiatan ekspor dan impor, serta penumpang. Pelabuhan Siwabessy dan Slamet Riyadi merupakan pelabuhan yang mendukung kegiatan pelayaran antarpulau dan pelabuhan lokal. Pelabuhan-pelabuhan tersebut merupakan pintu masuk bagi siapa saja yang berkunjung ke Kota Ambon menggunakan jasa transportasi kapal laut.

Bandara yang dijadikan tempat penelitian yaitu bandara Pattimura Ambon. Bandara Pattimura merupakan satu-satunya bandara di Kota Ambon, serta merupakan pintu masuk ke Provinsi Maluku bagi para pendatang yang menggunakan jasa transportasi udara.

Data penelitian ini terdiri atas foto dan hasil wawancara. Data foto-foto berupa tulisan-tulisan pada nama lembaga, sarana umum, ruang pertemuan, produk barang/jasa, nama jabatan, penunjuk atau rambu umum, spanduk/alat informasi, serta tulisan-tulisan lainnya yang ada di lingkungan bandara dan pelabuhan. Data foto yang dianalisis yaitu sebanyak tiga puluh tiga (di bandara), dan tiga puluh tiga foto (di pelabuhan).

Data primer lainnya yaitu data wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan pihak pelabuhan dan bandara untuk mengetahui latar belakang pemilihan bahasa di ruang publik. Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara tidak terstruktur (*snow ball*) tetapi tetap memanfaatkan beberapa pertanyaan-pertanyaan kunci.

Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan sebagai langkah awal dalam pengumpulan data. Instrumen yang digunakan yaitu kamera ponsel, alat perekam suara, pena dan kertas.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis wacana (*discourse analysis*). Analisis wacana digunakan untuk mengkaji struktur pesan dalam teks. Analisis wacana dilahirkan oleh suatu pandangan bahwa persoalan yang muncul dalam komunikasi tidak hanya mencakup penggunaan bahasa atau ucapan, tetapi juga struktur pesan yang lebih kompleks dan inheren yang disebut wacana (Littlejohn dalam LIPI, 2017).

Instrumen yang digunakan untuk mengolah data foto disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Instrumen tersebut terdiri atas penilaian

kaidah kebahasaan, fisik kebahasaan, dan tipografi kebahasaan. Pada bagian kaidah kebahasaan, penilaian dititikberatkan pada penggunaan ejaan, pilihan kata, dan struktur kalimat. Pada bagian fisik kebahasaan, penilaian dititikberatkan pada penilaian posisi penulisan bahasa Indonesia, ukuran huruf, dan warna huruf. Pada bagian tipografi kebahasaan penilaian dititikberatkan pada bagian bahan, desain, dan kejelasan.

Instrumen penilaian diisi dengan rentang nilai 10—30. Nilai 10 diberikan pada tulisan dalam foto yang tidak mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Nilai 20 diberikan pada tulisan dalam foto yang masih menyandingkan penggunaan bahasa Indonesia dengan bahasa lainnya. Nilai 30 diberikan pada tulisan-tulisan dalam foto yang memprioritaskan penggunaan bahasa Indonesia.

Setelah melakukan penilaian, maka dilakukan penyesuaian peringkat keterkendalian. Peringkat terkendalian merupakan bentuk hasil penilaian penggunaan bahasa negara di suatu wilayah. Deskripsi peringkat keterkendalian terlihat pada tabel 2.

Tabel 2 Peringkat Keterkendalian

Terkendali	Rentang	Deskripsi
A	867--1000	Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya sangat terkendali: secara fisik tidak ditemukan bahasa asing; sepenuhnya berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang sangat baik.
B	733--866	Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya cukup terkendali: secara fisik tidak didominasi bahasa asing; jauh lebih banyak berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang makin baik.
C	600--732	Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya kurang terkendali: secara fisik kurang didominasi bahasa asing; mulai lebih banyak berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang mulai baik.
D	466--599	Kategori ini menunjukkan wilayah yang penggunaan bahasa di ruang publiknya sangat kurang terkendali: secara fisik masih didominasi bahasa asing; sangat sedikit berbahasa negara dengan penerapan kaidah dan tipografi yang sangat kurang baik.

PEMBAHASAN

Penilaian Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik Pelabuhan dan Bandara di Kota Ambon

Penilaian penggunaan bahasa diperoleh melalui penerapan instrumen yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Pada awalnya, peneliti melakukan pemantauan penggunaan bahasa di pelabuhan-pelabuhan dan bandara di Kota Ambon. Pemantauan dilakukan dengan mengambil foto tulisan-tulisan yang terdapat pada nama lembaga dan gedung, nama sarana umum, nama ruang pertemuan, nama produk barang/jasa, nama jabatan, penunjuk arah atau rambu umum, spanduk atau alat informasi lainnya, serta tulisan-tulisan pada tempat-tempat yang mudah diakses oleh pengguna jasa. Pelabuhan yang diambil datanya yaitu pelabuhan Yos Sudarso, Slamet Riyadi, dan Siwabessy. Sedangkan bandara yang dijadikan tempat pemantauan yaitu bandara Patimura Ambon.

Berikut ini akan dipaparkan cara penilaian foto pada instrumen penilaian melalui beberapa contoh foto. Contoh foto-foto berikut ini, diambil dari pelabuhan dan bandara di Kota Ambon.

SR4

SR8

SW1

YS1

YS12

Penjelasan dari foto-foto tersebut yaitu foto dengan kode YS merupakan foto-foto yang diambil di pelabuhan Yos Sudarso; foto dengan kode SR diambil di pelabuhan Slamet Riyadi; dan foto dengan kode SW diambil di pelabuhan Siwabessy. Kelima foto tersebut kemudian dimasukkan ke format penilaian. Hasil penilaian foto-foto tersebut dapat dilihat pada tabel 3 hasil penilaian pelabuhan.

Tabel 3 Hasil Penilaian Pelabuhan

INSTRUMEN PENILAIAN PELABUHAN																	
Nama Wilayah: Pelabuhan										Jumlah	807	Tingkat	Terkendali B				
No.	Kode Data	Variabel Penilaian															Jumlah
		Kaidah Kebahasaan (30%)					Fisik Kebahasaan (50%)					Tipografi Kebahasaan (20%)					
		Ejaan	Pilihan Kata	Struktur	Nilai KK x Bobot	Posisi (60%)	Nilai FK x Bobot	Urutan Huruf (20%)	Warna Huruf (20%)	Nilai FK x Bobot	Nilai FK x Bobot	Bahan	Desain	Kejelasan	Nilai TK x Bobot		
1	SR4	30	30	20	8,0	30	18,0	30	6,0	30	6,0	15,0	20	20	30	4,7	27,7
2	SR8	30	30	30	9,0	30	18,0	30	6,0	30	6,0	15,0	30	30	30	6,0	30,0
3	SW1	20	30	30	8,0	30	18,0	30	6,0	30	6,0	15,0	10	10	10	2,0	25,0
4	YS1	10	10	10	3,0	10	6,0	10	2,0	10	2,0	5,0	30	30	30	6,0	14,0
5	YS12	20	20	20	6,0	20	12,0	20	4,0	20	4,0	10,0	20	30	30	5,3	21,3

Sumber: Hasil pengolahan data

Sumber: Hasil pengolahan data

Data SR4 merupakan data yang diambil di pelabuhan Slamet Riyadi. Data tersebut merupakan contoh rambu penunjuk. Berdasarkan hasil penilaian, terdapat kesalahan penggunaan struktur kalimat. Struktur kalimat pada tulisan SR4 semestinya diubah menjadi “KELUAR PEJALAN KAKI”. Gambar SR4 terlihat terbuat dari bahan semipermanen, dan memiliki desain yang cukup menarik. Oleh karena itu, nilai bahan dan desain pada kolom tipografi kebahasaan, masing-masing diberi nilai 20.

Data SR8 juga diambil di pelabuhan Slamet Riyadi. Data tersebut merupakan contoh nama lembaga/gedung. Tulisan pada data tersebut telah memenuhi syarat penilaian tertinggi pada tabel instrumen penilaian.

Data SW1 merupakan data yang diambil di pelabuhan Siwabessy. Data tersebut berisi informasi jadwal kapal di pelabuhan Siwabessy. Pada tabel penilaian, tulisan pada data SW1 memiliki kesalahan penulisan ejaan, yaitu penambahan tanda

titik pada penulisan KM (semestinya tanpa tanda titik). Data SW1 tertulis pada bahan yang tidak permanen, memiliki desain yang tidak menarik, dan memiliki tulisan yang tidak jelas.

Data YS1 merupakan data yang diambil di pelabuhan Yos Sudarso. Data tersebut merupakan contoh penamaan nama gedung. Pada bagian penilaian, diketahui bahwa penilaian kaidah dan fisik kebahasaan hanya memiliki nilai yang paling rendah. Hal tersebut dikarenakan tulisan pada data tersebut hanya menggunakan istilah asing.

Data YS12 merupakan data yang diambil di pelabuhan Yos Sudarso. Data YS12 contoh data spanduk. Berdasarkan hasil penilaian, data tersebut memperoleh nilai dua puluh pada bagian kaidah kebahasaan. Hal tersebut dikarenakan terdapat kesalahan penggunaan ejaan, pilihan kata dan struktur. Data YS12 juga memperoleh nilai dua puluh pada variabel fisik kebahasaan karena telah mencampuradukan pilihan kata bahasa asing dan bahasa Indonesia. Kalimat yang benar pada data tersebut yaitu “TUKARKAN KODE PESANAN TIKET ANDA DENGAN PAS NAIK DI VENDING MACHINE (DUA JAM SEBELUM KEBERANGKATAN KAPAL)”.

Pembahasan berikutnya, yaitu data-data yang telah diambil di bandara Pattimura Ambon. Berikut ini akan dibahas lima contoh penggunaan bahasa pada foto-foto yang telah diambil.

Foto-foto di atas menunjukkan contoh penggunaan bahasa di bandara Pattimura Ambon. Foto-foto tersebut terletak di tempat-tempat yang sangat strategis, sehingga mudah dibaca oleh pengguna bandara.

Tulisan-tulisan di dalam foto-foto tersebut akan dianalisis menggunakan instrumen penilaian. Hasil penilaian foto-foto tersebut dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4 Hasil Penilaian Bandara

INSTRUMEN PENILAIAN BANDARA																
Nama Wilayah: Bandara		Jumlah: 745 Tingkat: Terkendali B														
No.	Kode Data	Variabel Penilaian														
		Kaidah Kebahasaan (30%)					Fisik Kebahasaan (50%)					Tipografi Kebahasaan (20%)				
		Ejaan	Pilihan Kata	Struktur	Posisi (60%)	Nilai x Bobot	Urutan Huruf (20%)	Warna Huruf (20%)	Nilai x Bobot	Bahan	Desain	Kejelasan	Nilai x Bobot	Nilai x Bobot	Nilai x Bobot	Jumlah
1	PTM1	10	10	10	3,0	10	6,0	10	2,0	10	2,0	5,0	30	30	30	14,0
2	PTM8	30	30	30	9,0	20	12,0	20	4,0	20	4,0	10,0	30	30	30	25,0
3	PTM9	30	30	30	9,0	20	12,0	20	4,0	20	4,0	10,0	20	30	30	24,0
4	PTM22	10	10	10	3,0	10	6,0	10	2,0	10	2,0	5,0	20	30	30	13,0
5	PTM33	30	30	30	9,0	30	18,0	30	6,0	30	6,0	15,0	30	30	30	30,0

Data PTM1 merupakan contoh penulisan nama lembaga. Data tersebut menggunakan kata dalam bahasa asing. Hal tersebut menyebabkan penilaian kaidah kebahasaan dan fisik kebahasaan memperoleh nilai sepuluh. Perbaikan tulisan pada gambar tersebut yaitu

“BANDARA INTERNASIONAL PATTIMURA”.

Data PTM8 merupakan contoh rambu penunjuk yang ada di bandara Pattimura. Pada tulisan tersebut terdapat penulisan kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Hal tersebut menyebabkan variabel fisik kebahasaan memperoleh nilai dua puluh.

Data PTM9 merupakan contoh penamaan ruang di bandara Pattimura. Tulisan pada data tersebut menunjukkan penggunaan bahasa Indonesia diikuti dengan penggunaan bahasa asing. Namun sayangnya, posisi, ukuran huruf, dan warna huruf bahasa asing disamakan dengan bahasa Indonesia. Hal tersebut menyebabkan penilaian fisik kebahasaan hanya memperoleh nilai dua puluh pada setiap variabelnya.

Data PTM22 merupakan contoh rambu penunjuk. Tulisan yang tercantum pada data tersebut hanya menggunakan kosakata bahasa asing. Hal tersebut menyebabkan nilai yang diperoleh pada variabel-variabel kaidah dan fisik kebahasaan hanya sepuluh. Data PTM 33 merupakan contoh tulisan saran umum. Data tersebut memperoleh nilai tiga puluh pada setiap variabel penilaian. Hal tersebut dikarenakan penggunaan kata toilet telah diserap oleh bahasa Indonesia. Posisi kata *Kamar Kecil* dan *Toilet* sama-sama merupakan kosakata bahasa Indonesia.

Setelah melakukan analisis pada instrumen penilaian terhadap seluruh foto, maka diperoleh nilai akhir. Pelabuhan memperoleh nilai akhir sebesar 807, sedangkan bandara memperoleh nilai akhir 745. Kedua tempat pemantauan tersebut masuk pada kategori peringkat terkendali B. Kategori ini menunjukkan penggunaan bahasa Indonesia di wilayah pelabuhan dan bandara di Kota Ambon cukup terkendali. Secara fisik tidak didominasi bahasa asing yang melemahkan. Selain itu,

penggunaan bahasa negara jauh lebih banyak dengan menerapkan kaidah dan tipografi yang makin baik. Hasil rekapitulasi penilaian dapat terlihat pada tabel 5.

Tabel 5 Rekapitulasi Penilaian

No	Tempat Pemantauan	Jumlah Nilai	Peringkat
1	Pelabuhan	807	Terkendali B
2	Bandara	745	Terkendali B

Peringkat terkendali B menunjukkan penggunaan bahasa asing di ruang publik pelabuhan dan bandara di Kota Ambon, umumnya, masih bisa dikendalikan. Meskipun demikian, terdapat beberapa penggunaan bahasa asing pada tempat-tempat yang strategis, sehingga langsung memunculkan pendapat bahwa penggunaan bahasa asing di pelabuhan dan bandara telah memprihatinkan. Oleh karena itu, dibutuhkan wawancara dengan pihak pelabuhan dan bandara untuk mengetahui latar belakang pemilihan kata dalam pembuatan papan-papan informasi.

Latar Belakang Penyusunan dan Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik Pelabuhan dan Bandara di Kota Ambon

Informasi mengenai latar belakang penyusunan dan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik pelabuhan dan bandara di Kota Ambon diperoleh melalui wawancara dengan pihak pengelola pelabuhan dan bandara. Pihak-pihak yang diwawancarai yaitu orang-orang yang bertanggung jawab dalam proses penyusunan kata-kata dalam tulisan-tulisan di ruang publik pelabuhan dan bandara.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa PT Pelindo 4 Cabang

Maluku merupakan pihak yang bertanggung jawab, dari segi teknis dan operasional, terhadap pelabuhan Yos Sudarso, Slamet Riyadi, Siwabessy, dan Banda. Dengan demikian, hal-hal yang berhubungan dengan penentuan bahasa di ruang publik pada pelabuhan-pelabuhan tersebut harus dikoordinasikan dengan pihak PT Pelindo 4 Cabang Maluku. PT Pelindo 4 Cabang Maluku merupakan cabang dari PT Pelindo 4 Makassar.

Peneliti telah menanyakan sembilan pertanyaan kepada pihak pelabuhan Yos Sudarso, Slamet Riyadi, Siwabessy dan bandara Pattimura. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan yaitu siapa yang memasang papan-papan imbauan di instansi bapak/ibu ini?; bagaimana bapak/ibu menentukan kata/kalimat yang digunakan pada papan-papan informasi?; bagaimana alur pemasangan papan-papan imbauan di instansi bapak/ibu?; apakah ada koordinasi antarlembaga untuk menentukan tulisan pada papan-papan imbauan?; apakah Anda mengetahui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009?; apakah kata/kalimat yang digunakan dalam tulisan-tulisan di papan-papan imbauan dirasa mampu menyampaikan informasi yang ingin disampaikan?; apakah kata/kalimat yang digunakan dalam tulisan-tulisan di papan-papan imbauan dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna jasa?; bagaimana pendapat bapak/ibu soal pemartabatan bahasa negara di ruang publik?; dan apakah bapak/ibu bersedia menggunakan padanan istilah asing dalam bahasa Indonesia pada ruang-ruang publik yang telah menggunakan istilah asing?.

Simpulan yang dapat diambil dari pertanyaan nomor satu yaitu pemasangan papan-papan imbauan yang ada di pelabuhan-pelabuhan dilakukan oleh pihak PT Pelindo 4 Cabang Ambon. Penentuan redaksi kalimat dibuat di bagian umum. Di bandara, penentuan titik pemasangan dilakukan oleh bagian *airport operation*,

sedangkan pemasangannya dilakukan oleh bagian teknis.

Simpulan pertanyaan kedua yaitu penentuan kata/kalimat dalam papan-papan informasi di pelabuhan, ada yang langsung ditentukan oleh pusat, ada yang dibuat sendiri oleh pihak PT Pelindo 4 Cabang Ambon. Di bandara, penentuan kata/kalimat dalam papan informasi telah diatur dalam “Standar *Signage* Bandar Udara”.

Simpulan pertanyaan ketiga yaitu, alur pemasangan papan-papan imbauan di pelabuhan dari bagian umum PT Pelindo 4 Cabang Ambon, kemudian diserahkan ke bagian teknis. Setelah itu didistribusikan ke pelabuhan-pelabuhan. Pihak pelabuhan juga dapat mengajukan usulan pemasangan papan-papan imbauan. Di bandara, alur pemasangan papan-papan imbauan dilakukan dari bidang operasi ke bagian teknis.

Simpulan pertanyaan keempat yaitu tidak ada koordinasi antarlembaga dalam menentukan kata/kalimat pada tulisan di papan-papan imbauan. Koordinasi biasanya hanya dilakukan secara internal instansi (pelabuhan maupun bandara).

Simpulan pertanyaan kelima yaitu, keberadaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lagu Kebangsaan tidak diketahui oleh pihak pelabuhan dan bandara. Undang-undang tersebut juga tidak dimasukkan sebagai salah satu dasar penyusunan Standar *Signage* Bandar Udara.

Simpulan pertanyaan keenam yaitu, kata/kalimat yang digunakan pada tulisan-tulisan di papan-papan nama dan imbauan dirasa telah mampu menyampaikan informasi. Pihak pelabuhan dan bandara setuju jika penggunaan bahasa Indonesia dapat menyampaikan informasi dengan baik kepada para pengguna jasa.

Simpulan pertanyaan ketujuh yaitu kata/kalimat dalam tulisan-tulisan di papan-papan nama dan imbauan yang ada saat ini telah mudah dipahami. Hal tersebut

dikarenakan, pihak pelabuhan banyak menggunakan bahasa Indonesia pada tulisan-tulisan tersebut. Pihak bandara juga memiliki pendapat yang sama. Tulisan-tulisan yang dipasang sesuai “Standar *Signage* Bandar Udara” dianggap telah mudah dipahami oleh siapa pun.

Simpulan pertanyaan kedelapan yaitu pihak pelabuhan dan bandara setuju bahwa pemertabatan bahasa negara di ruang publik merupakan hal yang penting. Mereka sadar bahwa bahasa adalah cerminan bangsa dan negara.

Simpulan pertanyaan kesembilan yaitu pihak pelabuhan dan bandara bersedia untuk menggunakan padanan istilah bahasa asing dalam bahasa Indonesia pada ruang-ruang publik yang telah menggunakan istilah asing. Mereka juga bersedia untuk berkoordinasi dengan pihak Kantor Bahasa Provinsi Maluku dalam hal memadankan istilah asing ke bahasa Indonesia.

Keberadaan tulisan-tulisan di ruang publik pelabuhan dan bandara merupakan wajah penggunaan bahasa masyarakat Kota Ambon. Hal tersebut dikarenakan pelabuhan dan bandara merupakan tempat pertama yang akan didatangi oleh siapa saja yang baru datang di Kota Ambon. Pemilihan kata/kalimat dalam bahasa Indonesia dapat membantu para pengguna jasa pelabuhan dan bandara memahami aturan yang ada di pelabuhan dan bandara.

Fenomena penggunaan istilah asing pada penamaan pelabuhan dan bandara juga menjadi perhatian khusus bagi peneliti. Permasalahan tersebut juga telah ditanyakan kepada pihak pelabuhan dan bandara. Ketidaktahuan pihak pelabuhan dan bandara pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 merupakan salah satu penyebab penggunaan bahasa asing pada papan nama utama pelabuhan dan bandara. Setelah diberi pemahaman terhadap pengutamaan bahasa negara di ruang publik, pihak pelabuhan dan bandara berjanji untuk mengganti tulisan-tulisan

yang menggunakan bahasa asing dengan bahasa Indonesia, atau membuat terjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia, dengan memprioritaskan penggunaan kata/kalimat dalam bahasa Indonesia, kemudian diikuti dengan bahasa asingnya (tulisan bahasa Indonesia lebih mencolok dibandingkan bahasa asing).

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, simpulan yang dapat ditarik yaitu penggunaan bahasa ruang publik di pelabuhan dan bandara di Kota Ambon jika dilihat dari hasil penilaian bahasa masuk pada kategori terkendali B. Wilayah yang masuk kategori B merupakan wilayah yang penggunaan bahasa cukup terkendali. Pada wilayah tersebut masih banyak ditemukan tulisan-tulisan yang menggunakan bahasa Indonesia.

Pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik harus terus-menerus digalakkan. Bahasa Indonesia sebagai negara telah menjadi identitas bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan terlebih lagi pada ruang-ruang publik yang terdapat di pelabuhan dan bandara. Kedua tempat tersebut menjadi pintu masuk dan keluar bagi siapa saja yang akan berkunjung di suatu daerah.

Berdasarkan hasil pemantauan diketahui bahwa masih terdapat banyak tulisan yang menggunakan bahasa Indonesia pada ruang-ruang publik pelabuhan dan bandara di Kota Ambon, dibandingkan penggunaan istilah asing. Meskipun demikian, terdapat beberapa tulisan yang menggunakan istilah asing. tulisan-tulisan tersebut terdapat pada papan nama utama.

Selain itu, ditemukan juga papan-papan informasi dan petunjuk yang belum terpasang. Hal tersebut ditemukan di pelabuhan-pelabuhan. Jika dibandingkan bandara, papan-papan petunjuk di pelabuhan sangat minim. Meskipun demikian, pihak Pelindo berjanji akan

melengkapi papan-papan informasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pihak pengelola bandara dan pelabuhan memiliki acuan khusus dalam menata ruang-ruang publiknya. Sayangnya, dalam acuan-acuan tersebut, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan belum menjadi salah satu sumber dalam menentukan tulisan-tulisan yang ada di ruang-ruang publik pelabuhan dan bandara.

Sosialisasi keberadaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan kepada pihak bandara dan pelabuhan di Kota Ambon harus dilaksanakan. Hal tersebut bertujuan agar pihak bandara dan pelabuhan di Kota Ambon dapat lebih memahami pengutamaan bahasa Indonesia di ruang-ruang publik, sehingga dapat diaplikasikan di lingkungan pekerjaan.

Koordinasi, sosialisasi, dan tindak lanjut merupakan hal-hal yang penting dilaksanakan dalam memartabatkan bahasa negara. Dibutuhkan langkah-langkah yang tersistem agar pemartabatan bahasa negara di ruang publik dapat terwujud dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2018). *Petunjuk Teknis Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik*.
- Blommaert, J. (2013). *Ethnography, Superdiversity and Linguistic Landscapes: Chronicles of Complexity*. Ontario: Multilingual Matters.
- Hasan, N. H. (2019).
KETERKENDALIAN
PENGUNAAN BAHASA
INDONESIA PADA “MEDIA LUAR

- RUANG” DI KOTA AMBON.
Totobuang, 7(2), 247--260.
- Jayanti, A. (2018). Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lanskap Linguistik di Bandara Internasional Yogyakarta. In *Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara “Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum”* (pp. 475--491). Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima.
- Landry, R., & Bourhis, R. Y. (1997). Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: An empirical study. *Journal of Language and Social Psychology*.
<https://doi.org/10.1177/0261927X970161002>
- Panitia Pengembang Pedoman Bahasa Indonesia. (2016). *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesi*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Retrieved from <http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/PUEBI.pdf#page=8&zoom=auto,-195,422>
- Purba, A. (2019). PERSEPSI PENGGUNA MODA TRANSPORTASI TERHADAP PENGGUNAAN BAHASA DI RUANG PUBLIK DI SEMBILAN KOTA INDONESIA. *MEDAN MAKNA: Jurnal Ilmu Kebahasaan Dan Kesastraan*, XVII(1), 1--14. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/288194977.pdf>
- Ratna, N. K. (2010). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sahril, S., Harahap, S. Z., & Hermanto, A. B. (2019). Lanskap Linguistik Kota Medan: Kajian Onomastika, Semiotika, Dan Spasial. *MEDAN MAKNA: Jurnal Ilmu Kebahasaan Dan Kesastraan*, 17(2), 195.
<https://doi.org/10.26499/mm.v17i2.2141>
- Shohamy, E., & Gorter, D. (2008). *Linguistic landscape: Expanding the scenery. Linguistic Landscape: Expanding the Scenery*.
<https://doi.org/10.4324/9780203930960>
- Stroud, C., dan S. M. (2009). Towards a Material ethnography of Linguistic Landscape: Multilingualism, Mobility and Space in a South-African Township. *Journal of Sociolinguistics*, 13(3), 363--383.
- Widiyanto, G. (2018). Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lanskap Linguistik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. In *Prosiding Seminar dan Lokakarya Pengutamaan Bahasa Negara Lanskap Bahasa Ruang Publik: Dimensi Bahasa, Sejarah, dan Hukum* (pp. 71--83). Jakarta.
- LIPI, 2017. *Modul Penelusuran dan Pengumpulan Data pada Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama*. Jakarta: Pusbindiklat Peneliti.
2017. *Modul Analisis Data dan Interpretasi Hasil Penelitian (IPS) pada Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama*. Jakarta: Pusbindiklat Peneliti.